

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata asyarakat suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk emenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan juga berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan menurut *Word Bank* keadaan dimana seseorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjanai kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya.

Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang individu atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pakaian, makanan, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standar tertentu. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat komsumsi

seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi seseorang dalam perbulan (Badan Pusat Statistik, 2016)

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatannya dalam memenuhi standar hidup disuatu masyarakat tidak sekedar tercukupikebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan (Nugroho, 1995)

Tempat tinggal yang layakpun merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004)

Kemiskinan tidak hanya masalah income semata, melainkan terkait dengan kapabilitas-kapabilitas yang harus dimiliki oleh seseorang dalam hal ini salah satunya menyangkut masalah akses-akses baik terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja.

Luasnya dan sejauh mana kemiskinan yang melanda setiap negara tergantung pada dua faktor: (1) tingkat rata-rata pendapatan nasional dan (2) tingkat ketimpangan dan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan itu. Semakin tidak merata distribusi pendapatan itu, semakin luas pula terjadinya kemiskinan (Todaro dan Smith, 2004)

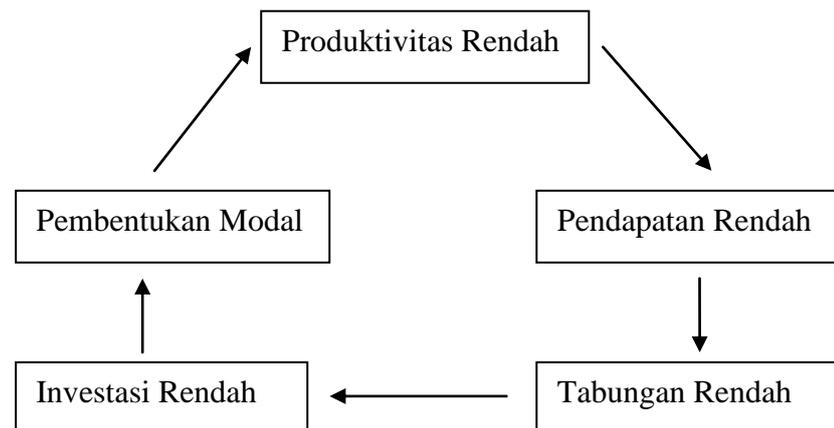
Menurut Todaro dan Smith (2006), Kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik, antara lain :

- 1) Tingkat pendapatan nasional negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- 2) Pendapatan perkapita negara dunia ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat, bahkan ada beberapa negara yang mengalami stagnasi
- 3) Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata ; 20% penduduk yang paling kaya menerima 5 hingga 10 kali lipat pendapatan yang diterima 40% oleh golongan yang paling miskin.
- 4) Mayoritas penduduk negara dunia ketiga dibawah tekanan kemiskinan absolut harus bertahan hidup.
- 5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan yang sangat buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi lebih tinggi dibandingkan di negara maju.
- 6) Dinegara berkembang fasilitas kebanyakan isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan dan memadai, selain itu tingkat kegagalan penyelesaian pendidikannya relatif tinggi, sedangkan tingkat melek huruf sangat rendah.

Ada 2 lingkaran perangkat kemiskinan menurut Nurkse (1993), yaitu :

1) Dari Segi Penawaran (Supply)

Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung rendah, menyebabkan tingkat pembentukan modal rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal dan dengan demikian tingkat produktivitas juga rendah.



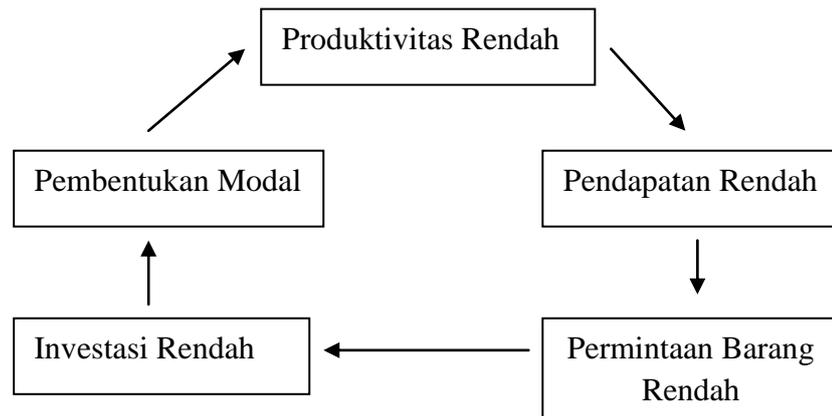
Sumber : Mudrajat Kuncoro, 2006

Gambar 2.1
Lingkaran Kemiskinan dari Segi Penawaran

2) Dari Segi Permintaan (Demand)

Di negara miskin perangsang untuk menanamkan modal adalah sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang yang kesediaannya terbatas, hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang sangat rendah, karena tingkat produktivitasnya yang

rendah sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas dimasa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal dan seterusnya.



Sumber : Mudrajat Kuncoro, 2006

Gambar 2.2
Lingkar Kemiskinan dari Segi Permintaan

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki empat kondisi, Adapun keempat kondisi tersebut, yaitu (Suryawati, 2004) :

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata untuk kebutuhan pokok

berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin.

2) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif dan relatif bergantung pada pihak lain.

3) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif dapat diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada

umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

2. Jumlah Penduduk

Badan Pusat Statistik didalam Berita Resmi Statistik Indonesia (2013), menjabarkan penduduk adalah semua orang yang berdomisili diwilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap.

Menurut Said (2001), yang disebut penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, migrasi dan mortalitas.

Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang. Pendapatan perkapita yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang rendah semakin sulit bagi negara berkembang untuk menopang ledakan jumlah penduduk. Sekalipun output meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditelan oleh jumlah penduduk yang terlalu banyak. Alhasil, tidak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan nyata perekonomian (Jhingan, 1994)

Pada umumnya perkembangan penduduk di negara sedang berkembang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Masalah pertumbuhan penduduk bukanlah sekedar masalah jumlah, masalah penduduk juga menyangkut kepentingan pembangunan juga kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah dua, ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan, ada pula yang menganggap sebagai pemicu pembangunan.

Alasan penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan (Dumairy, 1996).

Penduduk sebagai pemicu pembangunan karena populasi yang lebih besar adalah pasar yang potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai kegiatan macam ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan dan penawaran tenaga kerja murah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi. Pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun (Todaro dan Smith, 2006)

Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa ada tujuh konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk, yakni berdampak pada pertumbuhan ekonomi, ketersediaan bahan bangunan, pendidikan, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, kesehatan, lingkungan hidup serta migrasi internasional.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah suatu bentuk pengaruh yang terdiri dari ragam pengaruh yang terpilih berdasarkan tujuan yang dapat membantu anak-anak agar berkembang secara jasmani, akal maupun pikiran. Dalam prosesnya ada upaya yang harus dicapai agar diperoleh hasil yang maksimal, tercapai kehidupan harmoni secara personal dan sosial. Segala bentuk yang dilakukan menjadi lebih sempurna, kokoh dan lebih bagus bagi masyarakat. (Yunus, 1990).

UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003, mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensinya yang ada didalam diri peserta untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, kepribadian yang lebih baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan dan ketrempilan yang dibutuhkan oleh dirinya maupun masyarakat.

Todaro dan Smith (1995), mengungkapkan seberapa pentingnya pendidikan disuatu negara, terlebih di negara berkembang seperti Indonesia ini. Pendidikan disemua tingkat atau jenjang pendidikan telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif dan dibekali dengan tambahan pengetahuan dan keterampilan
2. Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan memperoleh sumber penghasilan yang lebih banyak.
3. Menciptakan suatu kelas pemimpin yang berpendidikan untuk mengisi jabatan-jabatan kosong dilembaga pemerintah dan perusahaan umum yang telah ditinggalkan oleh orang asing yang pulang kembali ke negaranya.
4. Memberikan bentuk pendidikan dan pelatihan yang akan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, berhitung dan memiliki kemampuan dasar disamping mengacu sikap-sikap modern penduduknya.

Pendidikan merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna mendapatkan kesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baikdimasa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Dengan pendidikan terprogram baik dan menjangkau semua dengan kualitas tertentu maka pendidikan menjadi instrumen terpenting dan paling efektif untuk memotong rantai kemiskinan yang ada dinegara berkembang.

4. Tingkat Pengangguran

Menurut Sukirno (2004), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Faktor utama yang menyebabkan pengangguran adalah kekurangan agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat diantara tingkat pendapatan nasional yang dicapai (GDP) dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan; semakin tinggi pendapatan nasional (GDP), semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.

Dalam indikator ketenagakerjaan pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah di terima kerja tetapi belum memulai pekerjaannya.

Dari tahun ketahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah

Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi di era globalisasi ini persaingan tenaga kerja semakin ketat terutama karena dibukanya perdagangan bebas yang memudahkan penawaran tenaga kerja asing yang diyakini lebih berkualitas masuk ke dalam negeri.

Penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi; satu dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Jadi pertumbuhan penduduk dengan tingkat penghasilan rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi.

Penduduk yang selalu berkembang menuntut adanya perkembangan ekonomi yang terus-menerus. Semua ini memerlukan lebih banyak investasi. Bagi negara berkembang, cepatnya perkembangan penduduk menjadi sebuah ganjalan dalam perkembangan ekonomi, karena negara-negara ini memiliki sedikit kapital.

Todaro dan Smith (2004), menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Dengan kata lain, semakin banyak angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka output hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu.

Mankiw (2006), dalam bukunya menyatakan bahwa orang dewasa yang berumur 16 tahun keatas digolongkan dalam 3 tingkatan,

1. Bekerja, kategori ini mencakup seseorang yang bekerja sebagai pegawai yang menerima upah, bekerja pada usaha milik sendiri, atau bekerja sebagai pegawai yang tidak menerima upah pada usaha keluarga. Kategori ini juga mencakup mereka yang memiliki pekerjaan namun tidak sedang bekerja karena untuk sementara waktu absen. Missal karena liburan, sakit, atau cuaca yang buruk.
2. Tidak bekerja, kategori ini mencakup mereka yang tidak bekerja, memiliki keinginan untuk bekerja, memiliki keinginan bekerja, dan telah mencoba mencari pekerjaan selama 4 minggu terakhir. Kategori ini juga mencakup mereka yang sedang menunggu

panggilan kerja kembali dari tempat dimana mereka diberhentikan dari pekerjaannya.

3. Tidak masuk dalam angkatan kerja, kategori ini mencakup mereka yang tidak termasuk dalam dua kategori awal seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau pensiunan.

Pada masa sekarang usaha-usaha mengurangi pengangguran adalah dengan menggunakan rencana pembangunan ekonomi yang menyertakan rencana ketenagakerjaan secara matang. Disamping itu, disertai pula kesadaran akan ketenagakerjaan yang lebih demokratis menyangkut hak-hak memilih pekerjaan, lapangan pekerjaan, lokasi pekerjaan sesuai kemampuan, kemauan tenaga kerja tanpa diskriminasi.

Pemecahan masalah pengangguran terutama menjadi peran dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah lebih serius menangani masalah ketenagakerjaan setempat.

Yang menjadi masalah besar untuk saat ini di negara kita adalah meningkatnya angka pengangguran pada setiap tahunnya. Dan menyangkut faktor utama dalam permasalahan tersebut bisa saja beragam, itu artinya tidak hanya satu faktor yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia pada setiap tahunnya meningkat.

5. Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

a. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan menghambat suatu pembangunan ekonomi di negara berkembang. Pendapatan perkapita yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang rendah akan membuat suatu negara berkembang semakin sulit untuk menopang ledakan jumlah penduduk. Sekalipun output meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditelan oleh banyaknya jumlah penduduk. Alhasil, pertumbuhan pada perekonomian tidak memungkinkan ada perbaikan yang nyata.

Kuncoro (1997) jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Ada dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh penduduk dan pembangunan. Pertama, adalah pandangan pesimistis yang berpendapat bahwa penduduk (pertumbuhan penduduk yang pesat) dapat mengantarkan dan mendorong pengurasan sumberdaya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan, kehancuran ekologis, yang kemudian dapat memunculkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kelaparan. Kedua, adalah pandangan optimis yang berpendapat bahwa penduduk adalah asset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi sehingga

dapat mendorong perbaikan kondisi sosial. Dikalangan para pakar pembangunan telah ada consensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap *supply* bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa dan sumber daya manusia.

Manusia memiliki proses kehidupan, sejak lahir hingga meninggal. Namun dalam daur ulang kehidupan tersebut terdapat penduduk yang usia produktif, artinya dalam usia produktif, penduduk tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas rutin. Manusia dikatakan usia produktif ketika penduduk berusia rentang 15-64 tahun. Penduduk produktif akan membantu dalam kelancaran segi perekonomian dan pembangunan dalam suatu wilayah.

b. Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Todaro (1994), menyatakan bahwa selama beberapa tahun, sebagian besar penelitian di bidang ilmu ekonomi, baik di negara-negara maju maupun berkembang yang menitikberatkan pada keterkaitan antara pendidikan, produktivitas tenaga kerja dan tingkat output. Hal ini tidak mengherankan karena sasaran utama pembangunan ditahun 1950-an dan 1960-an adalah memaksimumkan tingkat pertumbuhan output total. Akibatnya, dampak pendidikan atas distribusi pendapatan dan usaha

menghilangkan kemiskinan absolut sebagian besar telah dilupakan. Selanjutnya Todaro (2000), menyatakan bahwa pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas agar terciptanya pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Gaiha (1993) menjelaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam kesejahteraan seseorang dengan berbagai cara yang berbeda. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan penduduk untuk memperoleh dan menggunakan informasi, memperdalam pemahaman akan perekonomian, memperluas produktifitas dan memberi pilihan kepada penduduk apakah berperan sebagai konsumen, produsen atau warga negara. Selain itu pendidikan dan distribusi pendapatan mempunyai korelasi yang positif dengan penghasilannya selama hidup seseorang. Korelasi ini dapat dilihat terutama pada seseorang yang dapat menyelesaikan sekolah tingkat lanjutan dan universitas, akan mempunyai perbedaan pendapatan 300 persen sampai 800 persen, dengan kerja yang hanya menyelesaikan sebagian ataupun seluruh pendidikan tingkat sekolah dasar. Karena tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh lamanya tahun memperoleh pendidikan, jelas ketimpangan pendapatan yang besar tersebut akan semakin besar.

c. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Arsyad (2010), menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap disektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama halnya adalah, banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin.

Octaviani (2001), mengatakan bahwa sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperolehnya saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar

penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat pendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sedikit berada diatas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kemiskinan di berbagai daerah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan periode waktu yang berbeda, diantaranya :

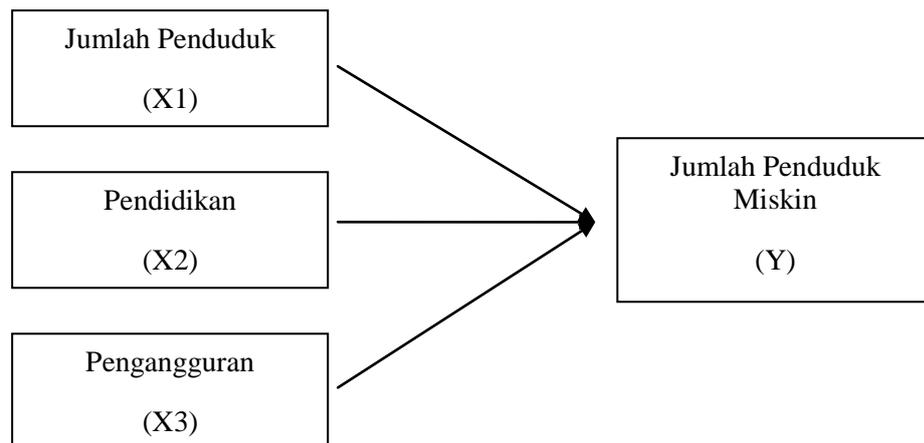
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Tentang Kemiskinan di Berbagai Daerah

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Wisnu Adhi Saputra (2011)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jawa Tengah	Dependen : Kemiskinan Independen : Jumlah Penduduk PDRB IPM Pengangguran	Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan dan PDRB, IPM dan Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan
2	Mujiono (2013)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Madiun	Dependen : Tingkat Kemiskinan Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan dan Pengangguran	Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan. Sedangkan variabel Pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan.

No	Peneliti	Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
3	Ida Sholehah (2014)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta	Dependen : Tingkat Kemiskinan Independen : Jumlah penduduk, TPT dan Pendidikan	Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
4	Van Indra Wiguna (2011)	Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Dependen : Kemiskinan Independen : PDRB, Pendidikan dan Pengangguran	PDRB dan Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan. Sedangkan, Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jateng.
5	Rahmat Jajuli (2013)	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah	Dependen : Kemiskinan Independen : Jumlah Penduduk, Pengangguran, Pendidikan dan Upah Minimum	Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan, pendidikan dan upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

C. Model Penelitian

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang skematis :



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Tingkat Pendidikan diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Tingkat Pengangguran diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.